

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya, sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh Tahun 2025, yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun kedepan yang berpedoman pada RPD 2023-2026. Lebih lanjut isi dari Rancangan Renja adalah gambaran perencanaan berbagai rencana pembangunan yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsi Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, sedangkan dalam penyusunan Program dan Kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 serta memperhatikan berbagai kondisi dan potensi lokal yang akan menjadi bagian dalam proses pembangunan dimasa-masa yang akan datang.

Demikian dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Renja Kesbangpol Kota Banda Aceh, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi pembangunan Kota Banda Aceh.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2023	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2023 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026	4
2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 2023- 2024.....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol.....	17
2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPd	20
2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Usulan Masyarakat	30
 BAB III. TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesbangpol	32
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	34
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL	
4.1. Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Kesbangpol.....	43
 BAB V. PENUTUP	
5.1. Catatan Penting.....	49
5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan	49
5.3. Rencana Tindak Lanjut	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di amanatkan untuk membuat dan memiliki Rancangan Renja SKPD yang merupakan panduan kerja bagi SKPD dan sebagai alat kontrol bagi pencapaian target pembangunan selama 1 (satu) tahun. Sesuai amanat undang-undang tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2025. Renja Badan Kesbangpol tahun 2025 merupakan dokumen kerja tahunan yang mengacu pada pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

1.2. Landasan Hukum

Renja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2025, berpedoman pada;

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
14. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Kota Banda Aceh 2007–2027 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 16 Seri E Nomor 6);
15. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009 – 2029;
17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
18. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026.
19. Peraturan walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk Periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam menentukan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan ditahun 2025.

Adapun tujuan dari Penyusunan Renja Badan Kesbangpol adalah:

1. Mereview capaian pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh sampai dengan Tahun 2024 dan menganalisis kesesuaiannya dengan target Renstra;
2. Menetapkan Program/kegiatan/sub kegiatan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025; dan
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta evaluasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025, disusun dengan sistematika berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum penyusunan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

Bab II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

Bab ini memuat evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol tahun lalu (2024), dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026;
Memuat kajian (review) terhadap hasil pelaksanaan renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025

Bab III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2024

Berisi tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja, serta program dan kegiatan

Bab IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.

Bab V : PENUTUP

Memuat uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN 2025

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara lengkap tentang pencapaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan / program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur yang valid untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah program / kegiatan. Dalam konsep ini diperlukan indikator input (masukan), output (keluaran) dan outcome (hasil).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023-2026

Review hasil Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2024 dan capaian Renstra Tahun 2023-2026 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan kesbangpol Tahun 2024 dan perkiraan capaian Renja Tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Renja Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada tabel 2.1. sebagai berikut:

TABEL 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kesbangpol) Tahun 2023-2025		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Renja Kesbangpol Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kesbangpol s/d Tahun 2024			
							Target Renja Tahun 2023		Realisasi Renja Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(7+9)		11=(10/6)		
8 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100	%	0		100	%	62	%	62	100	%	81	%	40	%	
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	100	%	0		100	%	100	%	100	100	%	100	%	50	%	
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	Dokumen	0		5	Dokumen	5	Dokumen	100	5	Dokumen	10	Dokumen	50	%	
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	0		100	%	102	%	102	100	%	50	%	50	%	
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	103	Orang/Bulan	0		25	orang/Bulan	26	orang/Bulan	104	26	Orang/Bulan	52	Orang/Bulan	50	%	
8 01 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	Dokumen	0		12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	24	Dokumen	50	%	
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	0		100	%	0	%	0	100	%	25	%	25	%	
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	144	Paket	0		36	paket	0	paket	0	36	Paket	36	Paket	25	%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kesbangpol) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023						Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kesbangpol Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kesbangpol s/d Tahun 2024			
					Target Rencana Tahun 2023		Realisasi Rencana Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kesbangpol Tahun 2024		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 % 0		100 % 70.00		70.00		100 % 100		100 % 43		43		43	
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	40 Paket 0		10 Paket 10		10		100 10		100 20		20		50	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	20 Paket 0		5 Paket 0		0		0 5		100 5		5		25	
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	40 Paket 0		10 Paket 8		8		80 10		100 18		18		45	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80 Laporan 0		20 Laporan 20		20		100 20		100 40		40		50	
8 01 01 2.06	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 % 0		100 % 67		67		100 % 100		100 % 33		33		33	
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	48 Laporan 0		12 laporan 12		12		100 12		100 24		24		50	
8 01 01 2.06 03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan 0		1 laporan 0		0		0 0		100 0		0		0	
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan 0		12 laporan 12		12		100 12		100 24		24		50	

Kode	Unsur/ Bidang Unsur Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana) Kabupaten Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023				Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kabupaten Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kabupaten s/d Tahun 2024				
						Target Rencana Tahun 2023		Realisasi Rencana Tahun 2023				Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)	
1	2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10=(7+9)		11=(10/4)		
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	0	100	%	33%	%	33	100	%	36	%	36	%
8.01.01.2.09.01	Pemediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	unit		3	Unit	3	Unit	100	3	Unit	6	Unit	50	%
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	44	unit		2	Unit	0	Unit	0	2	Unit	4	Unit	9	%
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	4	unit		1	Unit	0	Unit	0	1	Unit	2	Unit	50	%
8.1.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN DERBANGSA, SRI NEGARA DAN CINTA TANAH AIR	85	%		85	%	0	%	0	85	Kali	38	%	38	%
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pemantapan pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85	%		85	%	0	%	0	85	%	38	%	38	%
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	400	Orang		100	Orang	0	Orang	0	100	Orang	100	Orang	25	%
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200	orang		100	Orang	0	Orang	0	100	orang	100	orang	50	%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kelembaga) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kelembaga Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kelembaga s/d Tahun 2024									
			Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Rencana Tahun 2024	Realisasi Rencana Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)										
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(7+9)	11=(10/4)											
8	01	03					90	%			90	%	17	%	17	%					
			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																
8	01	03	2.01				90	%			90	%	17	%	17	%					
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik																
8	01	03	2.01	03			200	Orang			100	Orang	0	Orang	0	0	orang	0	orang	0	%
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																
8	01	03	2.01	04			200	Orang			100	Orang	0	Orang	0	0	orang	0	Orang	0	%
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																
8	01	03	2.01	05			8	Laporan			2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	4	Laporan	50	%
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di daerah		Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah																

Kode	Usahan/ Bidang Usutan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Pembangunan) Tahun 2023-2026	Realisasi Target Kinerja (hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023					Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Keabangsaan Tahun 2024		Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Pembangunan s/d Tahun 2024			
					Target Rencana Tahun 2023		Realisasi Rencana Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)			
1	2	3	4	5	6		7		8=(7/6)	9	10=(7+9)		11=(10/8)		
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	PERSENTASE TERSEDIAANYA DATA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	85	%	85	%	0	%	0	85	%	25	%	25	%
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	85	%	85	%	0	%	0	85	%	25	%	25	%
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	400	orang	100	Orang	0	Orang	0	100	orang	100	orang	25	%
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4	Laporan	1	Laporan	0	Laporan	0	1	Laporan	1	Laporan	25	%
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	85	%	85	%	0	%	0	85	%	33	%	33	%
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantauan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85	%	85	%	0	%	0	85	%	33	%	33	%
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	200	Orang	100	Orang	0	Orang	0	100	Orang	100	Orang	50	%
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	400	Orang	100	Orang	0	Orang	0	100	Orang	100	Orang	25	%
8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan monitoring di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	12	laporan	3	Laporan	0	Laporan	0	3	laporan	3	laporan	25	%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan dan sub kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Rencana Kerangka) Tahun 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan, Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerangka Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Kerangka s/d Tahun 2024	
										Target Rencana Tahun 2023	Realisasi Rencana Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)	Target Rencana Tahun 2024	Realisasi Rencana Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Rencana (%)
1	2			3		4		5		6			7			8	
8	01	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		85	%			85	%	25	%	25		85	%
				PERSENTASE TERLAKSANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITAS PENANGANAN KONFLIK												38	%
8	01	06	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		85	%			85	%	25	%	25		85	%
				Jumlah Dokumen Rekomendasi Kewaspadaan Dini, Serta Penanganan Konflik di Daerah.												38	%
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.	100	Orang			100	Orang	0	Orang	0		100	Orang
				Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah.												50	%
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	100	Orang			100	Orang	0	Orang	0		100	Orang
				Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.												25	%
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.	8	Laporan			2	Laporan	0	Laporan	0		2	Laporan
				Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.												25	%
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	8	Dokumen			2	Dokumen	2	Dokumen	100		2	Dokumen
				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.												50	%

2.1.1. Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rasionalisasi Anggaran
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rasionalisasi Anggaran
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rasionalisasi Anggaran
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rasionalisasi Anggaran
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi/Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.	Rasionalisasi Anggaran

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB
1	2	3	4	5
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.	Rasionalisasi Anggaran
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Masyarakat			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Rasionalisasi Anggaran

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	FAKTOR PENYEBAB
1	2	3	4	5
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan monitoring dibidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitas, Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial			
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rasionalisasi Anggaran
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Rasionalisasi Anggaran

2.1.2. Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

No	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	2	3	4
	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah/Kabupaten/Kota

2.1.3. Realisasi Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Untuk program/ kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan tidak ada.

2.1.4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Badan Kesbangpol

Dampak yang terjadi akibat tidak tercapainya indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Tahun 2024 maka :

1. Target renstra yang sudah ditetapkan tidak akan tercapai.
2. Tidak optimalnya informasi terkait Pelaksanaan Pemilu, Gerakan Nasional Refolusi Mental dikarenakan tidak ada pelaksanaan kegiatan sosialisasi
3. Tidak tertangani secara efektif masalah Kerukunan Antar Umat Beragama, dikarenakan TIM FKUB tidak berjalan

2.1.5. kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- Perencanaan akan menitik beratkan ke kegiatan yang tidak banyak membutuhkan anggaran.
- Hanya Melaksanakan kegiatan Prioritas
- Melaksanakan koordinasi dengan TAPD secara intens

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesbangpol dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh yang telah tertuang dalam RPD Kota Banda Aceh 2023-2026 dan Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel 2.2. sebagai berikut:

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL KOTA Banda Aceh 2023-2024

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Ketentraman Umum			74.63	74.64	75.08	75.09	58.88	60	75.08	74.64	
2	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial			100%	100%	100%	100%	66.70%	30%	100%	100%	
3	Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada			-	73.79%	-	-	-	81.65%		73.79%	
4	Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif			49.25%	50.13%	50%	50.17%	51.05%	67.39%	50%	50.13%	

Keterangan:

Pemilihan indikator diatas berdasarkan :

Indikator 1 : Indeks Ketentraman Umum adalah capaian tingkat penanganan konflik sosial, persentase Ormas, OKP dan LSM yang aktif serta Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada dengan 2 (dua) rumusan Indikator

$$1) = \frac{\text{Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial} + \text{Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif}}{2}$$

dan

$$2) = \frac{\text{Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial} + \text{Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif} + \text{Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pilkada}}{3}$$

Indikator 2 : Tingkat keberhasilan penanganan Konflik diukur berdasarkan pada jumlah potensi konflik yang dapat ditangani dibagi dengan Jumlah Potensi Konflik Sosial

Rumusan Komponen Indikator Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial

$$= \frac{\text{Jumlah konflik sosial yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi konflik sosial}} = \frac{3}{10} = 30 \%$$

(Lima kasus sedang ditangani)

Indikator 3 : Tingkat keaktifan Ormas, OKP dan LSM diukur berdasarkan jumlah Ormas, OKP dan LSM yang terdaftar dan aktif dapat dihitung dari

Rumusan Komponen Indikator Capaian Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif

$$= \frac{\text{Jumlah Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif}}{\text{Jumlah Ormas, OKP, dan LSM Terdaftar}} = \frac{93}{138} = 67,39 \%$$

Indikator 4 : Keberhasilan pelaksanaan Pemilu/Pemilukada bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat yang ikut dalam Pemilihan.

Rumusan Komponen Indikator Capaian Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada

$$= \frac{\text{Jumlah Pemilih yang Ikut Pemilu dan Pilkada}}{\text{Total Usia Pemilih}} = \frac{138.107}{169.146} = 81.65 \%$$

-4.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter bangsa

Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh bersama Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Melakukan Sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai pembina Upacara dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan kepada Siswa/pelajar.

Bidang Politik Dalam Negeri

Penyaluran dana bantuan Partai Politik memberikan motifasi kepada kader dalam menyukseskan Pemilu 2024 karena dengan bantuan Hibah Pada parpol diharapkan akan meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu karena dalam Bantuan Parpol terdapat anggaran untuk sosialisasi/Pendidikan Politik.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

1. Meminimalisir konflik antar umat beragama di Kota Banda Aceh
2. Dalam rangka tertib administrasi dan sahnya suatu organisasi kemasyarakatan (Ormas), Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh memberikan pelayanan kepada Ormas melalui Aplikasi SIORMAS. Terhadap Ormas yang mengajukan permohonan, Badan Kesbangpol memverifikasi berkas ajuan, cek di lapangan serta membuat Surat Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar yang ditujukan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Unit Layanan administrasi (ULA) di Jakarta.
3. Disamping pelayanan permohonan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas, Badan Kesbangpol juga memberikan pelayanan kepada Mahasiswa untuk membuat Rekom, kepada masyarakat maupun instansi terkait yang membutuhkan data/informasi.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

1. Terpetakannya pencegahan konflik sosial di beberapa lokasi di wilayah Kota Banda Aceh
2. Bersama Forkopimda dan Stackholder Melakukan Deteksi Dini timbulnya konflik di masyarakat

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi

Isu – isu penting pembangunan di Kota Banda Aceh yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh terdapat beberapa aspek pelayanan yang belum maksimal. Hal ini tentunya menjadi suatu permasalahan bagi Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh karena akan mempengaruhi terhadap pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik yang maksimal, dan menjadi permasalahan strategis bagi aspek pelayanan bidang kesatuan bangsa dan politik Kota Banda Aceh yaitu:

1. Iklim politik yang belum kondusif sering menimbulkan gejolak menimbulkan gelombang demonstrasi
2. Pemahaman politik yang rendah dan tidak merata di masyarakat sehingga sering terjadi konflik/pergesekan yang di akibatkan provokasi pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan
3. Fasilitasi bagi LSM, dan Ormas dan OKP yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim
4. Belum tertanamnya rasa Kebangsaan di masyarakat, terutama kalangan pemuda
5. Meningkatnya jumlah penggunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Banda Aceh. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah pengguna narkoba terus meningkat.

6. Sumber daya manusia yang kurang memadai
7. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Badan Kesbangpol.
8. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal

-4.3.3. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tantangan

1. Adanya potensi terjadinya konflik
2. Mobilitas penduduk di Kota di Banda Aceh yang sangat tinggi dapat memicu terjadinya konflik sosial

Peluang

1. Masyarakat yang masih memiliki jiwa toleransi; Perbedaan akan selalu ada, namun dengan sikap saling menghormati dan menghargai akan terhindarnya dari pertikaian, pertentangan dan permusuhan karena perbedaan tidak sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika;
2. Otonomi Daerah; dengan adanya Otonomi daerah Pemerintah daerah bersama masyarakat dapat saling bekerja sama dalam membangun wilayahnya;
3. Adanya regulasi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. Peran serta masyarakat yang tinggi dalam mengatasi ancaman di bidang politik, ideologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara sangat penting untuk mengintegrasikan kehidupan bangsa dan bhineka tunggal ika. Tidak membedakan keberagaman misalnya pada suku, budaya daerah dan sebagainya untuk mampu memahami keberagaman bangsa Indonesia, maka akan tercipta lingkungan yang aman dan damai;
5. Adanya Pembinaan terhadap Ormas, LSM, OKP dalam menangkal pengaruh Paham Radikalisme, Ekstrimisme dan terorisme.

-4.3.4. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi Dan Catatan Yang Strategis Untuk Ditindaklanjuti

- a. Perlunya optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat
- b. Pendataan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, LSM dan OKP
- c. Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan Karakter Bangsa
- d. Perlunya Koordinasi yang intens dengan Instansi terkait sehingga isu-isu strategis di Kota Banda Aceh cepat terdeteksi.

-4.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RPKK merupakan langkah awal ataupun dasar dalam menyusun rancangan Kerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh. Dalam Rancangan Awal RPKK tercantum program-program yang dijadikan pedoman penyusunan Kegiatan. Program yang disusun Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh perlu dilakukan sinkronisasi dengan rancangan awal RPKK sehingga dapat dirumuskan kedalam Program/Kegiatan/Sub Kegiatan untuk diajukan menjadi rencana kerja. Rencana Kerja ditetapkan berpedoman kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun Review Terhadap Awal RKPD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 Berikut ini:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
	BELANJA DAERAH				10,511,830,866					11,110,712,275		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banda Aceh	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100	%	5,047,291,866	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Banda Aceh	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	100	%	5,588,324,235
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	101	%	30,588,107	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	101	%	97,265,200
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen	30,588,107	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen	40,955,200
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Banda Aceh	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	53,840,000	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan	2,470,000	
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4,625,771,164	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	4,345,790,035
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26	Orang/Bulan	4,625,771,164	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/Bulan	4,345,790,035
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	19,800,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	69,800,000
8	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	36	Paket	19,800,000	Pengadaan Pakian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Banda Aceh	Jumlah Paket Pakian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	Paket	19,800,000
						pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Banda Aceh	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	50,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	119,081,895	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	192,741,000	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10	Paket	1,563,599	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	Paket	855,000	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Paket	17,854,667	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Banda Aceh	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	48,706,000	
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	10	Paket	14,663,629	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	4	Paket	15,180,000	
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	85,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	Laporan	128,000,000	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100	%	142,142,000		
						Pengadaan Mebel	Banda Aceh	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	29	Unit	42,044,000		
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	Unit	100,098,000		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	77,674,350	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	243,190,000	
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43,725,800	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42,650,000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	33,948,550	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	200,540,000	
17	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	174,376,350	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Banda Aceh	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	497,396,000	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	7,844,350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	164,172,000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	16,532,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit	12,624,000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	320,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
21	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Banda Aceh	PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN CINTA TANAH AIR	85 %	243,089,000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Banda Aceh	PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN CINTA TANAH AIR	85 %	436,413,400	
22	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banda Aceh	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85 %	243,089,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Banda Aceh	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	85 %	436,413,400	
23	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Dokumen	16,500,000						
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	43,500,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	96 Orang	130,273,800	
24						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2000 Orang	64,082,600	
25	Pembentukan paskibraka	Banda Aceh	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 Laporan	183,089,000	Pembentukan paskibraka	Banda Aceh	Jumlah Paskibraka	4 Orang	262,059,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
26	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	90 %	3,408,902,000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	90 %	3,354,701,000	
27	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	90 %	3,408,902,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	90 %	3,354,701,000	
28	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	100 Orang	133,162,000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100 Orang	133,721,000	
29	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	100 Orang		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	1 Orang	165,000,000	
30	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Laporan	3,275,740,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	2 Laporan	2,956,980,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
31	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Banda Aceh	PERSENTASE TERSEDIAKANYA DATA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	85 %	45,000,000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Banda Aceh	PERSENTASE TERSEDIAKANYA DATA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	85 %	73,399,140	
32	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85 %	45,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	85 %	73,399,140	
33	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	35,000,000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	38,519,000	
34	Pelaksanaan Monitoring dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	10,000,000	Pelaksanaan Monitoring dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan	34,800,140	
35	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	85 %	360,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	85 %	369,137,500	
36	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %	360,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %	369,137,500	
37	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	45,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	25,020,000	
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	285,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	344,137,500	
39	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	30,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
35	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	85 %	360,000,000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	85 %	369,157,500	
36	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %	360,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85 %	369,157,500	
37	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	45,000,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Dokumen	25,000,000	
38	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	285,000,000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	344,137,500	
39	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	3 Laporan	30,000,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0 Laporan		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
40	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banda Aceh	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	85 %	1,407,548,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banda Aceh	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	85 %	1,288,713,000	
41	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85 %	1,407,548,000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	85 %	1,288,713,000	
42	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	131,140,000	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	131,140,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Orang	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
40	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banda Aceh	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	85 %	1,407,548,000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Banda Aceh	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	85 %	1,288,715,000	
44	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	2 laporan	842,128,000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	Banda Aceh	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	2 laporan	831,568,000	
45	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Banda Aceh	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	2 Dokumen	434,280,000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Banda Aceh	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	2 Dokumen	289,760,000	
					10,511,830,866						

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ada penambahan beberapa sub kegiatan, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan penyesuaian rekening belanja dengan sub kegiatan

4.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Usulan Masyarakat

Ada beberapa usulan yang diterima Badan Kesbangpol dari Pemangku Jabatan. Dalam hal ini dapat dilihat dari Tabel dibawah ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Usulan	Anggaran	Catatan
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kota Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Banda Aceh	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	165,000,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kota Banda Aceh	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	175,000,000	
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kota Banda Aceh	PERSENTASE TERLAKSANANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK			
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kota Banda Aceh	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Banda Aceh	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10,000,000	
			JUMLAH	350,000,000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KESBANGPOL KOTA BANDA ACEH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional bidang Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Program Pembinaan kesatuan Bangsa dan Politik yang merupakan Program teknis yang bertujuan memperkuat Persatuan dan kesatuan Nasional serta stabilitas Politik dalam Negeri yang dilandasi oleh semangat dan Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, permasalahan umum dan menjadi isu strategis nasional terkait urusan pemerintahan umum sebagai berikut : (Renstra Ditjen Polpum 2020-2024)

1. Peningkatan potensi ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial
3. Terorisme dan Radikalisme
4. Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat sebagai Dampak Teknologi dan Informasi
5. Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
6. Melemahnya Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
7. Kualitas Demokrasi
8. Melemahnya Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;

Dalam perkembangannya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang berkaitan dengan upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara diantaranya dengan pembentukan forum-forum strategis yaitu :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006;
2. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006;
3. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006; dan
4. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 71 Tahun 2012.

Telaahan terhadap kebijakan Kesbangpol Propinsi Aceh

Sehubungan dokumen Renja tahun 2025 sedang disusun maka dari itu acuan Rancangan diambil dari tahun 2024.

Berdasarkan Tujuan Renja Badan Kesbangpol Provinsi Aceh adalah:

1. Meningkatkan keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki
2. Meningkatkan peran demokrasi indonesia didalam pembangunan

Sasaran Renja Badan Kesbangpol Provinsi Aceh yang harus ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah
2. Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat
3. Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh
4. Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya
5. Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia
6. Menigkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh (keterkaitan program Nasional, Propinsi terhadap Kota)

Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik jangka empat (4) tahun kedepan adalah:

1. Meningkatkan Efektifitas Pencegahan konflik sosial dan kewaspadaan nasional didaerah;
2. Meningkatkan potensi goresan ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional
3. Meningkatkan Kualitas Demokrasi
4. Merubah Perilaku Sosial Masyarakat sebagai Dampak Teknologi dan Informasi
5. Meningkatkan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan.
6. Menurunkan Tingkat Penggunaan Narkoba
7. Meningkatkan Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam jangka empat (4) tahun kedepan adalah :

1. Meningkatnya Efektifitas Pencegahan konflik sosial dan kewaspadaan nasional didaerah;
2. Meningkatnya Kualitas Demokrasi
3. Meningkatnya Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan.
4. Meningkatnya pemahaman bahaya Narkoba dikalangan masyarakat
5. Meningkatnya Pemahaman dan Implementasi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
6. Meningkatkan potensi ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Rancangan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2023 - 2026 yaitu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Target Indikator Tujuan dan Sasaran
Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja
1	2	3	4
1	Tujuan Mewujudkan Keamanan dan Kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh	Indeks Ketentraman Umum	74,64
2	Sasaran Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan, wawasan kebangsaan, sosial, budaya serta stabilitas politik di Kota Banda Aceh	Capaian Tingkat Penanganan Konflik Sosial	100%
		Persentase Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada	-
		Persentase Ormas, OKP, dan LSM yang Aktif	50,00%

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bahan pertimbangan terhadap rumusan Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Badan Kesbangpol dalam Rancangan Renja 2025 ini adalah seperti yang telah tertuang dalam dokumen Renstra Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh 2023-2026.

Rekapitulasi rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan tahun 2025:

Jumlah Program	: 6
Jumlah Kegiatan	: 11
Jumlah Sub Kegiatan	: 33
Pagu Indikatif	: Rp. 11.110.712.275,-

Rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas Badan Kesbangpol di Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN BADAN KESBANGPOL 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
KOTA BANDA ACEH

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	B. Aceh	100	%	5,588,324,235			100	%	5,751,109,537
8 01 01 2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun</i>	B. Aceh	100	%	97,265,200	PAD		100	%	39,588,107
8 01 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B.Aceh	11	Dokumen	40,955,200	PAD			Dokumen	30,588,107
8 01 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	B.Aceh	3	Dokumen	53,840,000	PAD			Dokumen	5,000,000
8 01 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B.Aceh	5	Laporan	2,470,000	PAD			Laporan	4,000,000
8 01 01 2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	B.Aceh	100	%	4,345,790,035	DAU		100	%	4,625,771,164
8 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	B.Aceh	30	Orang/Bulan	4,345,790,035	DAU			Orang/Bulan	4,625,771,164
8 01 01 2.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	B. Aceh	100	%	69,800,000	PAD		100	%	69,800,000
8 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	B.Aceh	1	Paket	19,800,000	PAD			Paket	19,800,000
8 01 01 2.05 0009	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		10	Orang	50,000,000	PAD			Orang	50,000,000

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10			
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	B. Aceh	100	%	192,741,000	PAD		100%	%	189,418,266
8	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	B. Aceh	1	Paket	855,000	PAD			Paket	1,563,599
8	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	B. Aceh	4	Paket	48,706,000	PAD			Paket	17,854,667
8	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	B. Aceh	4	Paket	15,180,000	PAD			Paket	20,000,000
8	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B. Aceh	20	Laporan	128,000,000	PAD			Laporan	150,000,000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	B. Aceh	100	%	142,142,000	PAD		100%	%	165,000,000
8	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	B. Aceh	29	Unit	42,044,000	PAD			Unit	45,000,000
8	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	B. Aceh	20	Unit	100,098,000				Unit	120,000,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B. Aceh	100	%	243,190,000	PAD		100	%	275,000,000
8	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	B. Aceh	12	Laporan	42,650,000	PAD			Laporan	45,000,000
8	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	B. Aceh	12	Laporan	200,540,000	PAD			Laporan	230,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B.Aceh	100	%	497,396,000			100	%	386,532,000
B 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	B.Aceh	2	Unit	164,172,000	PAD			Unit	120,000,000
B 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	B. Aceh	20	Unit	12,624,000	PAD			Unit	16,532,000
B 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	B.Aceh	1	Unit	320,600,000	PAD			Unit	250,000,000
B 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN CINTA TANAH AIR	B.Aceh	85	%	436,415,400			85	%	475,000,000
B 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	B.Aceh	85	%	436,415,400	PAD		85	%	475,000,000
B 01 02 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	B. Aceh	0	Dokumen	-	PAD			Dokumen	-
B 01 02 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	B. Aceh	96	Orang	110,273,800	PAD			Orang	150,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	B. Aceh	2000	Orang	64,082,600	PAD			Orang	45,000,000
B 01 02 2.01 0008	Pembentukan paskibraka	Jumlah Paskibraka	B. Aceh	4	Orang	262,059,000	PAD			Orang	280,000,000

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10		
8	01	03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	B. Aceh	90	%	3,354,701,000		90	%	3,193,162,000	
8	01	03	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	B. Aceh	90	%	3,354,701,000	PAD	90	%	3,193,162,000	
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	B. Aceh	100	Orang	232,721,000	PAD		Dokumen	133,162,000
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	B. Aceh	1	Orang	165,000,000	PAD		Orang	
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	B. Aceh	2	Laporan	2,956,980,000	PAD		Laporan	3,060,000,000

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1				2	3	4	5		6	7	8	9		10
8	01	04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE TERSEDINYA DATA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	B. Aceh	85	%	73,399,140			85	%	80,000,000
8	01	04	2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	B. Aceh	85	%	73,399,140	PAD		85	%	80,000,000
8	01	04	2.01	0003 Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	B. Aceh	100	Orang	38,599,000	PAD			Orang	40,000,000
8	01	04	2.01	0005 Pelaksanaan Monitoring di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	B. Aceh	1	Laporan	34,800,140	PAD			Laporan	40,000,000

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	B. Aceh	85	%	369,157,500		85	%	340,000,000
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	B. Aceh	85	%	369,157,500	PAD	85	%	340,000,000
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	B. Aceh	1	Dokumen	25,020,000	PAD		Dokumen	50,000,000
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	B. Aceh	100	Orang	344,137,500	PAD		Orang	290,000,000

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE TERLAKSANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	B. Aceh	85	%	1,288,715,000	PAD		85	%	1,505,000,000	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	B. Aceh	85	%	1,288,715,000	PAD		85	%	1,505,000,000	
8 01 06 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	B. Aceh	1	Dokumen	131,140,000	PAD			Dokumen	150,000,000	
8 01 06 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	Orang	10,000,000				Orang	25,000,000	

Kode					Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2026			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	B. Aceh	100	Orang	26,247,000	PAD			Orang	70,000,000
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan.	B. Aceh	2	Laporan	831,568,000	PAD			Laporan	960,000,000
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen hasil Pelaksaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	B. Aceh	2	Dokumen	289,760,000	PAD			Dokumen	300,000,000
										11,110,712,275					11,344,271,537

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH

Pendanaan indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, pelaksanaan kinerja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja daerah yang anggarannya diperuntukkan untuk Belanja Pegawai, Belanja Rutin dan Belanja Program Prioritas. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2025 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KESBANGPOL
Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

Kode				Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran		
						Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	
1				2	3	4	5		6	7	8	
8	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN PENUNJANG PERANGKAT DAERAH	B. Aceh	100	%	5,588,324,235			
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi OPD yang Tersusun	B. Aceh	100	%	97,265,200			
8	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	B. Aceh	11	Dokumen	40,955,200	PAD	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	B. Aceh	3	Dokumen	53,840,000	PAD	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	B. Aceh	5	Laporan	2,470,000	PAD	Badan Kesbangpol
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	B. Aceh	100	%	4,345,790,035		
8	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	B. Aceh	30	Orang/bulan	4,345,790,035	DAU	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025					Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikator	Sumber Dana	
1	2	3	4	5		6	7	8
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	B. Aceh	100	%	69,800,000		
8 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	B. Aceh	1	Paket	19,800,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.05 0009	pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	B. Aceh	10	Orang	50,000,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	B. Aceh	100	%	192,741,000		
8 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	B. Aceh	1	Paket	855,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	B. Aceh	4	Paket	48,706,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	B. Aceh	4	Paket	15,180,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	B. Aceh	20	Laporan	128,000,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	B. Aceh	100	%	142,142,000	PAD	
8 01 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	B. Aceh	29	Unit	42,044,000	PAD	Badan Kesbangpol
9 01 01 3.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	B. Aceh	20	Unit	100,098,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B. Aceh	100	%	243,190,000		
8 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik yang Disediakan	B. Aceh	12	Laporan	42,650,000	PAD	Badan Kesbangpol
8 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	B. Aceh	12	Laporan	200,540,000	PAD	Badan Kesbangpol

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana
1	2	3	4	5		6	7	8
801012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B.Aceh	100	%	497,396,000		
801012.090001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajanya	B.Aceh	2	Unit	164,172,000	PAD	Badan Kesbangpol
801012.090006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	B. Aceh	20	Unit	12,624,000	PAD	Badan Kesbangpol
801012.090009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	B.Aceh	1	Unit	320,600,000	PAD	Badan Kesbangpol
80102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PERSENTASE MENINGKATNYA KESADARAN BERBANGSA, BERNEGARA DAN CINTA TANAH AIR	B.Aceh	85	%	436,415,400		
801022.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	B.Aceh	85	%	436,415,400		
801022.010003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	B. Aceh	96	Orang	110,273,800	PAD	Masyarakat
901023.010004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	B. Aceh	2000	Orang	64,082,600	PAD	Masyarakat
801022.010008	Pembentukan paskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	B. Aceh	4	Orang	262,059,000	PAD	Siswa

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PERSENTASE PELAKSANAAN PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	B. Aceh	90	%	3,354,701,000	
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.	B. Aceh	90	%	3,354,701,000	
8 01 03 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	B. Aceh	100	Orang	232,721,000	FAD Masyarakat
8 01 03 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	B. Aceh	1	Orang	165,000,000	FAD Masyarakat
8 01 03 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	B. Aceh	2	Laporan	2,956,980,000	FAD Masyarakat

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5		6	7	8
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PERSENTASE TERSEDIA NYA DATA PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	B. Aceh	85	%	73,399,140		
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	B. Aceh	85	%	73,399,140		
8 01 04 2.01 0003	Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	B. Aceh	100	Orang	38,599,000	PAD	Masyarakat
8 01 04 2.01 0005	Pelaksanaan Monitoring di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	B. Aceh	1	Laporan	34,800,140	PAD	Masyarakat
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PERSENTASE PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	B. Aceh	85	%	369,157,500		
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	B. Aceh	85	%	369,157,500	PAD	
8 01 05 2.01 0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	B. Aceh	1	Dokumen	25,020,000	PAD	Masyarakat
8 01 05 2.01 0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	B. Aceh	100	Orang	344,137,500	PAD	Masyarakat

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan dan Sub Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2025				Kelompok Sasaran	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	
80106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PERSENTASE TERLAKSANYA PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK	B. Aceh	85	%	1,288,715,000	PAD	
801062.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	B. Aceh	85	%	1,288,715,000	PAD	
801062.010002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	B. Aceh	1	Dokumen	131,140,000	PAD	Masyarakat
801062.010003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		1	Orang	10,000,000		
801062.010004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	B. Aceh	100	Orang	26,247,000	PAD	Masyarakat
801062.010005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan.	Jumlah laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan.	B. Aceh	2	Laporan	831,568,000	PAD	Masyarakat
801062.010006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota.	B. Aceh	2	Dokumen	289,760,000	PAD	Masyarakat
						11,110,712,275		

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting.

Rencana Kerja (Renja) Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Kesbangpol Kota Banda Aceh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis serta terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika sosial kemasyarakatan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rancangan Renja Kesbangpol Kota Banda Aceh tahun 2025 yang sudah terpola dengan sistematis, terarah dan berkelanjutan memudahkan bagi semua pihak untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan dapat menjadi acuan pengukuran hasil kinerja organisasi bagi semua pihak yang berkepentingan, baik dalam pelaksanaan, tugas pokok dan fungsi maupun dalam kegiatan evaluasi dan pengawasan.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran OPD, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Kesbangpol Kota Banda Aceh secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 - Melaksanakan Rancangan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
 - Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rancangan Renja tahun 2025.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2025, selanjutnya Renja Tahun 2025 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikianlah Renja Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sehingga Rencana Kerja ini dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pelaksanaan pembangunan di Kota Banda Aceh tahun 2023-2026.

Banda Aceh, 19 Juli 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banda Aceh



HERU TRIWIDANARKO, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800104 199810 1 001

Rencana Kerja Tahun 2025



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
2024